



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

1. Bonifasius Paulinus, laki-laki, lahir di Maumere, 11 April 1987, umur 36

Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Wairhabi, RT/RW:013/004, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1**;

2. Elfrida Adelfora Wisang, Perempuan, lahir di Lela, 03 Agustus 1989,

umur 34 Tahun, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Wairhabi, RT/RW:013/004, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 13 Juni 2023, dibawah register perkara Nomor: 71/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah meperkawin secara sah di Gereja Stasi Stelamaris Lokaria, pada tanggal 27 Desember 2022 di hadapan Pastor RD. Vinsensius Ferrer Mere Ende ;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-17052023-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 17 Mei 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon meperkawin secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Lucia Nathaly Paula;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Mme



4. Bahwa anak Lucia Nathaly Paula telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Elfrida Adelfora Wisang, dikarenakan saat anak Lucia Nathaly Paula tersebut lahir, Para Pemohon belum melakukan perkawinan secara sah;
5. Bahwa anak Lucia Nathaly Paula, lahir di Rs. Kewapante, tanggal 25 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31072018-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2018;
6. Bahwa Pemohon Bonifasius Paulinus adalah ayah biologis dari anak Lucia Nathaly Paula;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Lucia Nathaly Paula juga dicantumkan nama ayahnya yakni Bonifasius Paulinus, guna melanjutkan sekolah bagi sang anak;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Lucia Nathaly Paula, lahir di Rs. Kewapante, tanggal 25 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31072018-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2018, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama Bonifasius Paulinus, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfrida Adelfora Wisang, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307190210170004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan Paroki STA. Maria Immaculata Habi tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor: 5307-KW-17052023-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-31072018-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P – 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi David Firdensius Hendi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Lucia Nathaly Paula;
 - Bahwa Orang tua biologis dari ketiga anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Bonifasius Paulinus selaku Bapak dan saudari Elfrida Adelfora Wisang selaku Ibu;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Pemohon 2 belum meperkawinin secara sah meskipun telah hidup bersama;

- Bahwa anak Lucia Nathaly Paula, lahir tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perperkawinanan secara agama katolik di depan pemuka agama RD. Vinsensius Ferrer Mere Ende pada tanggal 27 Desember 2022 dan perperkawinanan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa tujuan permohonan karena pada dokumen kependudukan Anak Lucia Nathaly Paulayaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;

2. Saksi Maria Olivia Candra, memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Lucia Nathaly Paula;
- Bahwa Orang tua biologis dari ketiga anak tersebut yang saya tahu adalah saudara Bonifasius Paulinus selaku Bapak dan saudari Elfrida Adelfora Wisang selaku Ibu;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum meperkawinin secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa anak Lucia Nathaly Paula, lahir tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perperkawinanan secara agama katolik di depan pemuka agama RD. Vinsensius Ferrer Mere Ende pada tanggal 27 Desember 2022 dan perperkawinanan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa tujuan permohonan karena pada dokumen kependudukan Anak Lucia Nathaly Paulayaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pemohon 1 dinyatakan benar merupakan bapak kandung dari anak Lucia Nathaly Paula;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi David Firdensius Hendi dan Saksi Maria Olivia Candra;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-6, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Pemohon 1, Pemohon 2 dan Lucia Nathaly Paula bertempat tinggal di Wairhabi, RT/RW:013/004, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Firdensius Hendi dan Saksi Maria Olivia Candra diperoleh fakta bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di depan pemuka agama RD. Vinsensius Ferrer Mere Endepada tanggal 27 Desember 2022 dan perperkawinanan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Mei 2023 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Firdensius Hendi dan Saksi Maria Olivia Candra diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran anak Lucia Nathaly Paula lahir Kewapante, tanggal 25 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31072018-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307190210170004 atas nama Kepala Keluarga Bonifasius Paulinus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 28 Maret 2023 menunjukan bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, dan Lucia Nathaly Paulamerupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Pemohon 1, Pemohon 2, anak Lucia Nathaly Paulatinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan anak Lucia Nathaly Paula sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Pemohon 1, Pemohon 2 selaku orang tua biologis anak tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Lucia Nathaly Paulatersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni Pemohon 2, hal ini dikarenakan Lucia Nathaly Paulatersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*",

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN MMe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut meperkawinani ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan perperkawinannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- kutipan akta kelahiran;
- kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- KK orang tua; dan
- KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perperkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki anak bernama Lucia Nathaly Paulayang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 27 Desember 2022 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 Desember 2022 secara sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Mme



perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan nama Pemohon ke dalam akte kelahiran ketiga anaknya tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak Lucia Nathaly Paula, lahir di Rs. Kewapante, tanggal 25 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31072018-0025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2018 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon 1 Bonifasius Paulinus dan Pemohon 2 Elfrida Adelfora Wisang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak bernama Lucia Nathaly Paula, pada Kutipan Akta kelahiran anak tersebut guna menambahkan nama Bonifasius Paulinus selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 224.500,00(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yohana F. Ito, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohana F. Ito, S.H.

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 4. R e d a k s i | : Rp. 10.000,00 |
| 5. M a t e r i a l | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Penggandaan | : Rp. 4.500,00 |
| 7. Biaya ATK / Proses | : <u>Rp.100.000,00</u> |
| Total | Rp 224.500,00(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) |